

Tarik Dua Mobdin

Eksekusi Usai Pol PP Ikut Rakor

PONTIANAK - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Barat TTA Nyarong mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengeksekusi dua mobil dinas. Hal itu karena kedua ken-

daraan tersebut masih dikuasai oleh orang yang tidak berhak. Kedua mobil dinas tersebut antara lain mobil mantan-Ketua DPRD periode lalu dan salah seorang pejabat di Badan Diklat.

"Kita segera eksekusi. Tetapi sekarang kabit-kabit sedang ikut diklat dan saya juga akan ikut rakor Pol PP se-Indonesia di Jakarta. Jadi, kemungkinan eksekusi kita laksanakan set-

elah nanti pulang dari Jakarta," katanya kemarin.

Menurut Nyarong, surat dari Sekretaris DPRD Kalbar yang memohon bantuan Pol PP untuk melakukan penarikan aset/eksekusi sudah diterima oleh pihaknya beberapa hari lalu. Surat perintah dari sekretaris daerah pun telah dikantongi.

Sayangnya, Nyarong enggan membeberkan lebih lanjut men-

Kami segera eksekusi. Kemungkinan eksekusi dilaksanakan setelah nanti pulang dari Jakarta

TTA Nyarong

genai dua jenis mobil yang akan ditarik tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa pihak pemprov telah beberapa kali menyurati yang bersangkutan (pemegang aset) supaya segera mengembalikan aset tersebut. Namun, kendaraan dinas tak kunjung dikembalikan sehingga upaya eksekusi terpaksa dilakukan.

• ke halaman 15 kolom 2

Tarik Dua Mobdin

Sambungan dari halaman 9

"Jadi kita sudah ada kemajuan dalam upaya menertibkan aset. Sudah ada surat permohonan kepala SKPD dan surat perintah sekda," ujarnya. Usai penertiban aset bergerak (mobil dinas) ini, sambung Nyarong, penertiban rumah jabatan DPRD di Jalan Karvin pun segera akan menyusul.

Seperu diberitakan sebelumnya, berdasarkan audit terhadap aset di lingkungan pemprov, BPK mendapati 26 temuan. Temuan tersebut antara lain

terkait adanya penggunaan dan pemanfaatan aset peralatan dan mesin milik pemprov yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp2.899.074.000.

Sejumlah aset berupa peralatan dan mesin masih dikuasai mantan ketua/anggota DPRD, mantan gubernur dan mantan PNS di lingkungan pemprov Kalbar. Ada pula aset peralatan dan mesin di rumah jabatan Ketua DPRD yang dikuasai pihak lain, serta persoalan aset bangunan dan gedung pada rumah dinas jabatan DPRD yang ditempati oleh bukan penghuni yang sah.

Bahkan, di antaranya ada yang disewakan tanpa persetujuan gubernur.

Sekadar catatan, hingga September 2011, pol pp telah melakukan eksekusi terhadap enam rumah dinas. Rumah itu yakni rumah dinas milik Dinas Kehutanan 1 unit, Dinas Kesehatan 2 unit, Dinas Pertambangan dan Energi 1 unit, Dinas Perhubungan 1 unit dan Dinas Pekerjaan Umum 1 unit. Khusus untuk Dinas PU, meski telah dieksekusi, masih ada upaya hukum dari mantan-pejabat yang menempatnya. (ron)